

STIGMATISASI DAN PROPAGANDA ANTI-SYIAH: SOROTAN DESKRIPTIF GERAKAN ANNAS

Ali Makhsu^{1,2}

¹Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

²Email: makhsu04@gmail.com

Abstract

The term anti-Shi'a is prejudice or hatred towards Shiite Muslims based on their religion and heritage. Anti-Shi'a efforts portray Shia as dangerous teachings by linking the Iraq and Syria conflicts, thus forcing some religious groups and the Indonesian Ulama Council (MUI) to issue heretical fatwas for Shi'ite teachings. How does anti-Shi'a propaganda manifest in describing Shi'ism? This paper describes the plot and context of anti-Shi'a in Indonesia. The anti-Shi'a container known as the National Anti-Shi'a Alliance (ANNAS) has become a new medium in campaigning for Shi'ite heresy. The sentiment of this movement adds a new list of Islamic boxes by giving birth to exclusive Islam. The participation of extremist, Salafi and conservative groups in the Shia stigmatization resulted in sentiments and propaganda towards Shia teachings.

Keywords: Anti-Shia, Group Sentiment, Minority.

ملخص

يفهم مصطلح ضد الشيعة بأنه ادعاء أو خصومة على المسلم الشيعي على حسب مذهبه أو تقاليده، وقد تسعى حركة ضد الشيعة في تصوير الشيعة كمذهب خطير بانتمائها إلى الصراع الطائفي في العراق وسوريا مما جعل المؤسسات الدينية ومجلس العلماء الإندونيسيين إصدار فتوى تحظر الشيعة لكونها من المذاهب الضالة والمضلة. تهدف هذه المقالة إلى وصف نشأة وتطور حركة ضد الشيعة في إندونيسيا. هذه الحركة متحركة في منظمة التحالف الوطني المناهض للشيعة وأصبحت من الوسائل الجديدة في الدعوة إلى ضلالة الشيعة، وأضافت إلى المنظمات الإسلامية منظمة جديدة تجعل الإسلام أكثر انغلاقاً داخلياً. وقد شارك في هذه الحملة ضد الشيعة كل من المنظمات المتطرفة، والسلفية، والأصولية مما أدى إلى ارتفاع الدعايات والإشاعات ضد الشيعة في إندونيسيا.

الكلمات المفتاحية: ضد الشيعة، الشعور الطائفي، الأقليات.

A. Pendahuluan

Kehadiran Islam di Indonesia menjadi perdebatan bagi kalangan sejarawan. Pengikut Syiah menganggap Islam dibawa ke Indonesia melalui Aceh pada abad kedelapan. Pedagang dari wilayah Hadramaut, Yaman melakukan ekspansi perdagangan melalui jalur laut selat Malaka. Meskipun motif awal adalah ekonomi, perselisihan Sunni dan

Syiah lebih dilandasi adanya kompleksitas dalam membedakan Syiah kultural dan Sunni puritan (IPAC, 2016: 6-7).

Kalangan Syiah percaya bahwa pembawa Islam pertama dari komunitas Arab-Hadrami, meskipun pengaruh terkuat masuknya Syiah adalah revolusi Iran. Revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1979 membuka kontak baru antara Iran dan Indonesia, mentransfer semangat

kebangkitan Islam dan melahirkan intelektual baru dalam masyarakat. Peristiwa ini mulai didiskusikan di kampus-kampus sebagai kebangkitan Islam. Slogan revolusi Iran “bukan Timur maupun Barat, tapi Islam” seolah menjadi ujung tombak ekspansi Iran ke Indonesia. Respon pemerintah saat itu sudah menunjukkan kekhawatiran jika proses revolusi menjalar sampai ke Indonesia. Corak keislaman Indonesia yang bermazhab Sunni mengakibatkan sentimen muncul sebagai wujud rivalitas dengan Syiah. Namun, sistem demokrasi mengharuskan bagi seluruh masyarakat menghargai perbedaan, terlebih dalam menganut aliran kepercayaan yang telah dijamin oleh undang-undang.

Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) di Bangil menjadi salah satu sarana kontak intelektual antara Iran dan Indonesia. Yayasan yang didirikan oleh Habib Husein Al-Habsyi ini berkembang sebagai pesantren Syiah besar di Bangil, Jawa Timur dan dikenal oleh masyarakat luas setelah revolusi Iran. Revolusi Iran memberikan efek kejut bagi masyarakat dunia, terlebih menambah kepercayaan diri bagi penganut Syiah di Indonesia. Penetrasi revolusi Iran secara lebih dalam dilakukan melalui ratusan sekolah yang didirikan oleh para alumni lembaga agama di Qom (IPAC, 2016: 8).

Syiah menjadi organisasi resmi di Indonesia melalui persetujuan Presiden Abdurrahman Wahid, pada 1 Juli 2000 dengan membentuk satu organisasi yang bernama IJABI (Ikatan Jamaah Ahlu Bait Indonesia). Organisasi yang didirikan oleh Jalaluddin Rahmat ini menjadi organisasi massa Syiah pertama yang mendaftar ke Departemen Dalam Negeri. Petingi Syiah Indonesia ini menjadi aktor intelektual dan menjabat sebagai anggota parlemen untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (www.ijabi.or.id). Pada tahun 2016, IJABI mengaku memiliki sekitar dua juta anggota dengan sekitar 200 cabang di seluruh provinsi.

Pada tahun 1984, kegelisahan Pemerintah Indonesia atas dampak dari revolusi Iran membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) merilis surat edaran

tentang “Ideologi Syiah”, yang mencantumkan lima perbedaan antara Sunni dan Syiah. Diantara perbedaan fundamental adalah bahwa Syiah melihat pembentukan kepemimpinan atau pemerintahan (*imamah*) sebagai pilar iman, sedangkan Sunni melihatnya sebagai sarana menegakkan kepentingan publik (MUI, 1984:15). Berbeda dengan sistem presidensial di Indonesia, proses kepemimpinan *imamah* yang berlaku di Iran mampu menggeser aktor politik dari kancah pemerintahan karena mengharuskan adanya mullah (Gelar ini berasal dari kata bahasa Arab maula, yang dapat berarti pemimpin atau 'pelindung', dan diberikan kepada seorang ulama Islam) dalam pimpinan tertinggi kenegaraan dengan sistem pemerintahan yang menggabungkan antara theologi dan demokrasi (theokrasi).

Sejak tahun 2000, masyarakat Syiah Indonesia mulai mendapatkan tekanan dan menjadi sasaran serangan kekerasan. Rumah dan sekolah yang diyakini terafiliasi kepada paham Syiah dilempar batu dan dibakar seperti dalam kasus Syiah Sampang, Madura. Sebagai minoritas, penganut Syiah Sampang menjadi kelompok yang terpinggirkan dan menjadi target kekerasan (Gerry, 2007:5). Upaya menghilangkan ideologi seseorang atau komunitas tertentu seperti Syiah dengan tindakan kekerasan dan anarkhis adalah tindakan yang tidak tepat. Dalam kasus di Indonesia kontestasi Sunni-Syiah menjadi tidak baik karena berusaha menghilangkan ajaran Syiah dengan memusuhi manusianya dan tidak lagi terbatas pada ranah 'ideologi, tetapi mencapai pada wilayah sektarianisme. Padahal, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab menyatakan secara jelas bahwa nilai-nilai humanisme menjadi acuan dasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Meningkatnya ketegangan Sunni-Syiah, disertai kampanye anti-Syiah yang berkembang di media sosial untuk membujuk mayoritas Muslim Sunni dari legitimasi jihad melawan Syiah membuat kelompok jihad menyebarkan narasi anti-

Syiah dengan membingkai konflik di tingkat global sebagai salah satu pemicu konflik sektarian. *Framing* perang di Suriah dan Iraq sebagai konflik agama, umat Islam versus non Muslim, bertujuan untuk membenarkan jihad dan memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memerangi kaum Syiah yang diklaim sebagai kelompok yang keluar dari Islam. Setidaknya, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai media jihad telah dibanjiri dengan gerakan anti-Syiah (Jhon, 2006:12). Salah satu organisasi global yang vokal dan menyatakan dengan terang-terangan memerangi Syiah adalah ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) sejak era Az-Zahrawi. Narasi ini cepat menyebar luas dalam slogan membebaskan diri dari faham “Syiah Laknatullah”. Seiring seirama, Indonesia sebagai penduduk mayoritas Sunni menyambut seruan untuk membendung faham Syiah ini melalui gerakan Anti-Syiah.

Upaya gerakan anti-Syiah memilih menggunakan kekerasan dalam upaya menyadarkan Muslim Syiah nyata terjadi. Eskalasi tindak kekerasan tidak terlepas dari konteks global yakni politik internasional dari hubungan yang kurang baik antara negara Sunni dan Syiah di Timur Tengah, khususnya dalam hal ini ketegangan antara Saudi Arabia dan Iran dalam perebutan politik sebagai negara yang berpengaruh. Disisi lain dalam konteks kekerasan terhadap kaum Syiah di Indonesia, pengawasan terhadap tata kelola hukum nasional dalam melindungi kaum minoritas menjadi faktor lain dalam adanya tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok yang merasa superior. Kontestasi politik nasional sedikit dieksploitasi guna mendapat simpati dalam Pemilu. Mungkin dalam kasus serangan terhadap minoritas Syiah adalah efek mikro-dinamika politik nasional dengan segala tuduhan guna menarik simpati masyarakat.

Dalam kasus anti-Syiah di Surakarta, terdapat konteks yang berbeda karena akar dan imbas dari ketegangan Sunni-Syiah sangat bersifat tendensius. Sebagai kota yang sangat sedikit atau

bahkan hampir tidak terdeteksi terdapat komunitas Syiah, gerakan anti-Syiah muncul dengan sangat percaya diri. Banyak upaya yang dilakukan dengan dalih membentengi umat dari doktrin Syiah. Gerakan anti-Syiah juga mulai membangun relasi dengan gerakan agama lain. Pada 20 september 2018, sekelompok masyarakat menamakan diri Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS) menyerang rumah yang dianggap melakukan ritual Asyura. Hal yang sama juga dialami lembaga Rausyam Fikr di Yogyakarta.

Tulisan ini mengkaji upaya perlawanan terhadap Syiah dalam kaitannya dengan isu politik, ideologi dan sentimen publik. Metode yang digunakan adalah dengan menyeimbangkan antara data lapangan melalui wawancara dan literatur-literatur keilmuan. Perpaduan ini diharapkan mampu mengulas permasalahan dengan secara terperinci. Teori yang digunakan untuk melihat lebih dalam permasalahan minoritas di Surakarta ialah teori *Wiktorowics Social Movement* tentang upaya persebaran ideologi melalui *framing* aksi, struktur praktek politik dan struktur mobilisasi. Teori ini dipandang mampu menguraikan aksi ANNAS dalam bersikap terhadap Syiah di Surakarta, yang bahkan tidak pernah vokal dalam bermasyarakat.

B. Pembahasan

1. Definisi Anti-Syiah

Revolusi Iran pada tahun 1979 menghasilkan antusiasme masyarakat Muslim Indonesia dengan munculnya semacam kebangkitan kembali agama di kalangan mahasiswa. Kebangkitan Islam kemudian menjelma sebagai konsep yang mendapat perhatian dalam diskursus pemikiran keislaman baik oleh para cendekiawan muslim sendiri maupun orientalis Barat. Dalam pengertian sederhana dan umum, kebangkitan Islam menunjuk kepada semakin tingginya kesadaran Islam pada diri umat Islam. Dekmejian menyebut kebangkitan Islam menggambarkan tingginya kesadaran Islam di kalangan umat Islam (Dekmejian,

2001:3). Namun demikian, penggunaan terminologi kebangkitan Islam ini mencakup fenomena yang cukup beragam, dari gerakan-gerakan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang dilakukan umat Islam.

Gerakan-gerakan anti-Syiah termasuk gerakan yang awal merespon dalam merumuskan cakupan kebangkitan Islam ini dan menyebabkan rekasi anti-Syiah di banyak tempat. Gerakan ini diantaranya dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin Presiden Suharto yang tidak ingin semangat revolusi Iran menginspirasi umat Islam di Indonesia. Saat itu, pemerintah berupaya membendung gelombang islamisasi yang menjangkiti arena politik Indonesia. Peringatan dilayangkan kepada para simpatisan revolusi Iran dan pengawasan terhadap mereka pun ditingkatkan. Sejumlah organisasi Sunni di Indonesia juga bereaksi menolak doktrin Syiah dan menyatakan Syiah adalah ajaran agama yang sesat.

Jika melihat data populasi kelompok Syiah, kecurigaan terhadap Syiah sebagai ancaman bagi persatuan Indonesia agak sedikit berlebihan. Jumlah Syiah di Indonesia sangat kecil, hanya sekitar 2,5 juta dari populasi keseluruhan penduduk Indonesia. Mereka terbagi menjadi tiga kelompok: (1) Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI); Ahlul Bait Indonesia (ABI); dan Organisasi Ahlul Bait Dukungan Sosial dan Pendidikan (OASE). Banyak asumsi bermunculan tentang aliran Syiah yang mulai menampakkan diri di Indonesia. Mulai dari pemicu kerusakan di Timur Tengah yang meliputi Iraq, Suriah dan yang terbaru Yaman, aliran Syiah juga dicitrakan sebagai pemecah belah Islam. Salah satu argumentasinya adalah keterlibatan Syiah dalam perang Jamal dan Siffin pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memperlihatkan bahwa mereka adalah penyebabnya. Asumsi-asumsi ini terus dibangun oleh gerakan Anti-Syiah.

Secara sederhana Anti-Syiah menyatakan aliran Syiah adalah

kafir dan sesat, dan oleh karena itu harus dimusuhi. Ini jelas dalam fatwa (pendapat agama) yang dikeluarkan oleh MUI Jawa Timur misalnya pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa ajaran Syi'ah (khususnya *Imamiyah Itsna Asyariyah* atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) serta ajaran-ajaran yang mempunyai kesamaan dengan paham Syi'ah *Imamiyah Itsna Asyariyah* adalah sesat dan menyesatkan (MUI Jatim: 2012). MUI merekomendasikan umat Islam Indonesia untuk waspada terhadap ajaran Syiah, baik yang jelas menggunakan nama Syiah atau nama samara lain. MUI Jawa Timur juga mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk menindak tegas dan melakukan proses hukum terhadap mereka yang terafiliasi kepada aliran Syiah. Upaya ini merupakan salah satu gerakan anti-Syiah.

Bentuk lain gerakan anti-Syiah di bidang ekonomi adalah mengambat promosi jabatan atau kenaikan karir bagi penganut mazhab Syiah seperti yang terjadi di Kerajaan Saudi Arabia, sedangkan pada ranah sosial ditemukan kaum Syiah dikucilkan dari partisipasi kegiatan kemasyarakatan seperti yang terjadi di Malaysia (Dede, 2017). Dalam negara-negara berbasis Sunni, Syiah diperlakukan sebagai warga negara kelas dua dan mereka dibatasi untuk mengakses hak mereka dalam politik, pendidikan dan kebudayaan.

Gerakan anti-Syiah sebagai wujud pertentangan umat Islam terhadap aliran tersebut dan memiliki tujuan untuk membendungnya melahirkan gerakan Aliansi Anti-Syiah (ANNAS). Gerakan ini diprakarsai oleh Forum Ulama Umat Islam (FUUI) dan ditandatangani oleh Athian Ali Moh. Da'i. Deklarasi anti-Syiah meliputi tiga poin komitmen yakni: *Pertama*, bahwa ajaran Syiah menurut keyakinan ummat Islam, merupakan paham yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, bahwa kelompok Syiah di Indonesia semakin berani dan masif mempropagandakan paham dan ajarannya lewat segala macam cara,

diantaranya dengan ber-*taqiyah* (mengelabui), baik melalui pendidikan, sosial kemasyarakatan, maupun politik. *Ketiga*, bahwa telah terjadi keresahan di berbagai daerah yang menimbulkan konflik horizontal sebagai akibat progresifitas penyebaran paham Syiah dan pembiaran politik terhadap pengembangan ajaran sesat Syiah (ANNAS, 2014)

Dari keawatiran terhadap persebaran Syiah, ANNAS membuat empat langkah antisipatif. *Pertama*, mendirikan lembaga ANNAS sebagai wadah *amar ma'ruf nahi mungkar*. *Kedua*, memaksimalkan upaya preventif, antisipatif, dan proaktif membela dan melindungi umat dari ajaran Syiah. *Ketiga*, mejalin ukhuwah islamiyah dengan berbagai organisasi dan gerakan dakwah Indonesia untuk menghambat dan mencegah persebaran ajaran Syiah. *Keempat*, mendesak pemerintah agar segera melarang paham dan ajaran Syiah.

2. Stigmatisasi terhadap Ajaran Syiah

Revolusi Iran memunculkan kekhawatiran di kalangan pemerintah dan masyarakat, terlebih kalangan Salafi Saudi Arabia. Diantara kelompok-kelompok Salafi di Indonesia adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1967 oleh Muhammad Natsir, mantan pemimpin Masyumi. Hubungan DDII dengan Saudi Arabia jelas, Natsir sebagai wakil Indonesia untuk *Rabitah Alam Islami* (Liga Muslim Dunia), organisasi internasional yang berbasis Mekkah dan didedikasikan untuk memperkuat pengaruh budaya dan ideologi keagamaan Saudi Arabia di dunia Muslim melalui propagasi Wahabisme. Wahabisme adalah ideologi keagamaan yang berkembang dari dakwah seorang teolog Muslim abad ke-18 yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab yang berasal dari Najd, Saudi Arabia. Muhammad bin Abdul Wahhab juga berjasa dalam pembentukan kerajaan Saudi pada 23 September 1932 bersama Raja Abdul Aziz As-Saud.

Agenda dakwah DDII ini banyak ditujukan untuk kepentingan geopolitik Saudi Arabia dalam konteks lokal.

Ancaman Revolusi Iran terhadap supremasi Saudi Arabia sebagai pemimpin dunia Islam memaksa DDII mau dimanfaatkan sebagai benteng ajaran Wahabi di Indonesia. Pemerintah Saudi Arabia mulai menggunakan berbagai organisasi amal untuk mengurangi pengaruh Iran dengan mendukung kampanye anti-Syiah, dan DDII diporyeksikan sebagai salah satu organisasi yang mengusung cita-cita tersebut. Ancaman Syiah Khomeini ke negara-negara Muslim menjadi indikasi bahwa doktrin *imamah* disebarkan oleh Khomeini dalam ambisi ekspansionis untuk menaklukkan seluruh dunia Islam dan menguasai seluruh 900 juta penduduk Muslim di dunia kala itu (Noorhaidi, 2005:32).

Kampanye anti-Syiah selama periode ini ditandai dengan tantangan intelektual terhadap doktrin-doktrin Syiah, seringkali kampanye ini dilakukan dengan mendistorsi doktrin-doktrin Syiah untuk menghasut ketakutan dan kebencian di kalangan Islam Sunni. Pada September 1997, sebuah seminar nasional anti-Syiah yang diselenggarakan oleh Saudi Arabia dan didukung oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Arab (LIPIA) diadakan di Masjid Istiqlal Jakarta. Kegiatan ini menandai aliansi lintas organisasi ulama untuk menuntut pemerintah secara resmi agar melarang Syi'ah di Indonesia. Dalam acara ini, LIPIA mengangkat tema keprihatinan atas ekspansi Syiah, konversi NU-Syiah, dan peningkatan distribusi publikasi Syiah (Chiara, 2014:15). Isu konversi NU-Syiah dilatarbelakangi adanya persepsi bahwa NU adalah Syiah kultural berdasarkan sejumlah ritual keagamaan serupa seperti tahlilan, maulid, ziarah kubur, shalawatan, dan tawassul. Gus Dur sendiri menganggap bahwa "NU itu Syiah minus *imamah*, Syiah itu NU plus *imamah*".

Pada saat pemerintahan Presiden Yudhoyono, pemerintah menjalin hubungan dekat dengan Iran untuk meningkatkan peran kepemimpinan internasional Indonesia. Pemerintah juga menggelar karpet merah untuk Presiden Iran Ahmadinejad dalam kunjungan

kenegaraan tiga hari pada Mei 2006. Dia mendapatkan sambutan meriah, terutama dari kalangan mahasiswa Islam dengan menyuarakan yel-yel “anti-Israel”. Peran Ahmadinejad dalam perjuangan bangsa Palestina melawan Israel merupakan agenda utama pemerintahannya. Selain itu, perang di Lebanon pada Juli 2006 juga menjadi panggung bagi Hizbullah dan pemimpinnya Nasrullah. Peran nyata Iran inilah yang menjadi objek pemujaan di kalangan aktivis muslim muda. Tetapi terjadi hal sebaliknya, bagi kalangan Salafi, Hizbullah yang diprakarsai Iran adalah bentuk kepura-puraan dalam melawan Israel. Arena perebutan pengaruh kuasa terhadap umat Islam Indonesia telah memicu *proxy war* bagi Iran dan Saudi. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan mitra penting yang dibutuhkan kedua negara dalam perebutan supremasi negara Islam.

Berbeda dengan konteks nasional, Solo memiliki fenomena tersendiri dalam hal gerakan Anti-Syiah. Setelah terbentuknya ANNAS di tingkat nasional, Solo menyambut semangat ini dengan mendirikan cabang ANNAS di wilayah Solo. Upaya ANNAS dalam mengoordinasi kelompok keagamaan untuk bergabung menyuarakan kesesatan ajaran Syiah mendapat respon ormas lokal. Tercatat beberapa mulai aktif dalam propaganda anti-Syiah diantaranya: DSKS (Dewan Syariah Kota Surakarta), DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia), JAT (Jamaah Anshorut Tauhid), JAS (Jamaah Anshorusy Syariah), dan FKAM (Forum Komunikasi Aktivis Masjid). Agenda yang diminta ANNAS dalam hal ini adalah menyatakan Syiah telah keluar dari Islam atau bahkan tidak bagian dari Islam. Citra Syiah sebagai perusak persatuan umat Islam dan sebagai ancaman konflik menjadi jargon baru yang terus digaungkan.

Stigmatisasi Syiah di wilayah Solo memiliki karakteristik sendiri. Syiah di Solo tidak memiliki organisasi resmi yang mewadahi mereka. Namun, di wilayah Pasar Kliwon yang terkenal dengan wilayah imigran dari Timur

Tengah disinyalir terdapat pengikut Syiah dari keturunan Yaman, Suriah, atau Iraq. Dalam keadaan demikian, gerakan ANNAS melakukan pembubaran terhadap perayaan Asyura di kediaman Asseegaf Bin Husain Al Jufri di Mertodranan, Pasar Kliwon, Semanggi pada September 2018 lalu (Jurnal Islam, 2018). Komunitas kecil ini terpaksa membubarkan diri.

Selain itu, peristiwa yang dialami oleh Kyai Mudzakir pimpinan Pondok Pesantren Al-Islam Gumuk menjadi sorotan tersendiri. Mudzakir dituduh berpaham Syiah. Sejumlah indikasi yang menjadi dasar tuduhan ini adalah: *pertama*, Mudzakir pernah belajar di YAPI Bangil, Pasuruan, pusat pendidikan Syiah pimpinan Husain Al Habsyi. *Kedua*, Mudzakir tidak ingin menyatakan Syiah sebagai aliran sesat, namun lebih memilih diksi muslim daripada dikotomi Sunni-Syiah. *Ketiga*, dialog antara Mudzakir dan Abu Bakar Ba’asyir tentang perang yang terjadi di Suriah. Ba’asyir menilai bahwa perang yang terjadi di Suriah adalah murni kekerasan Basyar Ashad terhadap penduduk Sunni, namun Mudzakir lebih memilih diam dalam konflik Suriah. Dalam akhir dialog yang terjadi di lapas Nusakambangan, Ba’asyir mengatakan kepada Mudzakir “Sudah kamu ngaku saja kalau dirimu Syiah.” (Widad, 2013).

Kemunculan gerakan anti-Syiah sebagai proses politik bermula dari revolusi Iran yang menyuarakan kebangkitan Islam. Melalui pergeseran arus politik nasional, gerakan ini menjalar ke daerah dan menimbulkan efek struktural terhadap dinamika permasalahan lokal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Quintan Wicktorowict bahwa komponen dasar dalam pergerakan Islam adalah struktur kesempatan politik. Konsep struktur kesempatan politik menjelaskan bahwa munculnya gerakan sosial seringkali dipicu oleh perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam struktur politik dan karenanya, meredupnya gerakan itu juga biasanya berhubungan dengan pergeseran-pergeseran yang terjadi di dalamnya (Quintan, 2004: 106).

Dalam memetakan gerakan keagamaan yang mengatasnamakan diri sebagai gerakan anti-Syiah, setidaknya ada tiga aliran yang berkontribusi terhadap serangan kekerasan pada minoritas Syiah di Indonesia. *Pertama*, ekstrimis Pro-ISIS telah mulai menargetkan Syiah dengan melihat konflik di Suriah dan Irak sebagai ajang penindasan Syiah terhadap Sunni. *Kedua*, Saudi yang berorientasi Salafi dengan mengusung Islam puritan, melihat Syiah sebagai aliran sesat yang memiliki paham bid'ah tahayul dan khurafat. Mereka telah meningkatkan upaya advokasi terhadap itu dengan menggunakan even internasional untuk memperingatkan bahwa Syiah berniat mendatangkan kehancuran di Indonesia dengan melihat kasus Suriah, Yaman dan Bahrain. *Ketiga*, kekhawatiran sejumlah orang konservatif tentang ketidakberpihakan umat Islam terhadap konflik internasional dan paham Syiah.

3. Propaganda dan sentimen gerakan anti-Syiah

Selain struktur kesempatan politik, konsep penting dalam teori gerakan sosial adalah konsep struktur mobilisasi dan *framing*. Struktur mobilisasi selalu ditopang oleh jaringan-jaringan sosial yang sudah terbangun sebelumnya. Dalam prosesnya, struktur ini harus melalui rekrutmen dan kemudian mobilisasi. Untuk memobilisasi inilah peran aktor-aktor gerakan sosial diperlukan untuk membingkai aksi-aksi yang mereka rencanakan dengan slogan-slogan dan bahasa yang mudah dipahami dan sekaligus dapat menggerakkan sentimen publik (Quintan, 2004:245). Di sinilah konsep *framing* sangat berperan sebagai seni mengkomunikasikan pesan untuk menggerakkan partisipan. Penanaman ideologi melalui kepercayaan, nilai dan makna menjadi kunci penting efektivitas *framing* ini.

Selama Orde Baru, propaganda anti-Syiah awalnya didorong oleh pertimbangan politik pemerintah atas pengaruh transnasional karakter religius antikemapanan revolusi Iran. Propaganda sering melibatkan penguasa sebagai kontrol opini kepada rakyat melalui jalur

prestasi penguasa secara berlebihan sehingga memunculkan berbagai kepercayaan di kalangan massa akan kehebatan dan keperkasaan para penguasa dalam menghadapi ancaman lokal maupun global (Heryanto, 2015:33). Dengan cara itu dinamika asing telah bersinggungan dengan persoalan-persoalan dalam negeri tentang stabilitas sosial-politik. Pada fase ini, marginalisasi kaum Muslim Syiah dan simpatisan Syiah datang *top-down* melalui kasus-kasus kriminal seperti di Sampang, Madura dan *bottom-up* melalui stigmatisasi dan kecaman dari perilaku menyimpang. Bentuk propaganda menggantikan istilah oposisi dari sosio-politik untuk sosio-teologis.

Propaganda anti-Syiah pada arena intelektual dilakukan melalui seminar, media masa, dan publikasi buku yang beredar di kalangan elite agama dalam lingkup formal. Kampanye anti-Syiah menjadi lebih besar dan sporadis baik oleh elit atau kaum awam. Perkembangan teknologi informasi membuat gerakan Anti-Syiah berusaha mengungkap kekejaman dan kesesatan Syiah melalui media *on-line*. Masifnya kampanye anti-Syiah merupakan upaya untuk mencabut hak Syiah sebagai warga negara dengan cara yang sistematis dan terorganisir (Zulkifli, 2013:244). Di Jawa Timur, sejumlah ulama Sunni melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah meminta pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan yang membatasi penyebaran ajaran Syiah dan menyatakan bahwa Syiah tergolong ajaran sesat. Stigmatisasi kesesatan Syiah segera mendapatkan respon dengan adanya perusakan rumah-rumah pengikut Syiah di Sampang, Madura dan di Ternate, Maluku Utara.

Untuk melancarkan proses *framing*, gerakan anti-Syiah berusaha memberikan slogan-slogan kafir, merusak islam, dan pemecah belah NKRI. Pasca revolusi Iran, gerakan anti-Syiah sudah mulai merambah pada ormas lama seperti NU dan Muammadiyah, atau bahkan membuat ormas baru sebagai bentuk upaya mobilisasi massa seperti ANNAS. Aksi-aksi kolektif memberikan

pemahaman bagaimana dinamika, proses dan organisasi aktivis keislaman telah menguat seiring dengan menguatnya dukungan pemerintah. Citra NU sebagai Syiah kultural juga menampilkan bentuk resisten dalam ruang lingkup intern.

Gerakan anti-Syiah dalam NU muncul pada tahun 1993 sebagai masalah kecil antara organisasi sayap progresif dan konservatif. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai pimpinan umum NU dituduh pro-Israel dan pro-Kristen, pro-Syiah dan sekuler kerana kedekatannya dengan Kristen, Syiah dan Yahudi, serta bentuk kekagumannya terhadap perkembangan Syiah setelah revolusi Iran. Dari sana NU konservatif menyatakan diri bahwa NU adalah Syiah kultural (Chiara, 2014:14). Hingga pada akhir November 1995, para pemimpin NU mengadakan pertemuan rekonsiliasi di sebuah pesantren di Jawa Timur. Salah satu dari banyak masalah yang diangkat oleh lawan-lawan Gus Dur adalah dugaan pengakuan tentang Ayatollah Khomeini sebagai wali (orang suci). Namun, Gus Dur mengakui bahwa ada perbedaan doktrinal antara Syiah dan Sunni serta mengatakan bahwa ia mengakui Khomeini bukan karena kepemimpinan agama, tapi untuk prestasi sosial dan politiknya.

Anti-Syiah memasuki perkembangan baru dengan munculnya Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS). Dengan pembentukan aliansi ini, anti-Syiah lebih terorganisir dan sistematis dengan jaringan yang luas. Aliansi ini juga menempatkan isu-isu Syiah sebagai satu-satunya target kampanye. Aliansi ini didirikan sebagai respon terhadap kekerasan di Sampang. Beberapa bulan setelah insiden ini sejumlah pemimpin Muslim konservatif di Jawa Barat mulai bergerak membentuk gerakan Nasional Anti-Syiah. Ide pertama muncul di 2012 melalui kongres Nasional dari Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI). FUUI adalah salah satu dari banyak organisasi advokasi prosyari'at yang muncul dengan pembukaan ruang demokrasi.

ANNAS telah mencapai tingkat baru dengan pelaksanaan informasi teknologi baru dalam menyebarkan

agenda-agendanya berbasis pada *gadget*. Melalui media sosial, gerakan ini menunjukkan sentimen yang melibatkan elite agama dan orang awam. Pembentukan ANNAS juga menandai perkembangan anti-Syiah yang lebih terorganisir dan sistematis. Isu sekterian yang dibawa ANNAS kedalam kancah nasional menjadi meluas kepada isu-isu minoritas lain. Tercatat selama bulan Ramadhan tahun 2019, ANNAS Solo Raya melakukan kajian melalui komunitas Masjid-ku Makmur dengan tema "Membentengi Akidah Umat Islam dari Paham Sesat: Syiah, LGBT, Komunisme, Liberalism, Sekulerisme dan Pluralism". Akun media online ANNAS berupa Instagram (@gardaannas2019) dan Facebook (Garda Annas Solo Raya) digunakan untuk mempermudah memobilisasi massa. Bentuk sentiment ANNAS memaksa masyarakat memandang perbedaan pandangan dalam akidah harus disikapi dengan tendensius. Tidak menutup kemungkinan semakin masifnya kajian yang bersifat menghukumi manusia akan menghasilkan tindakan radikalisme seperti kasus Sampang telah merugikan masyarakat dan negara dalam berkehidupan yang dinaungi oleh nilai-nilai Pancasila.

Upaya propaganda ANNAS merupakan satu bentuk sikap eksklusif. Pandangan bahwa selain Sunni Indonesia adalah sesat dan pantas dihilangkan merupakan bentuk *framing* yang disebarkan sebagai wujud rasa sentimen keagamaan. Demikian juga, pandangan sebagai pemilik ajaran yang paling benar dan menghakimi kelompok lain melakukan kerusakan adalah bentuk nyata sikap eksklusif. Stigmatisasi anti-Syiah ini telah menjalar menjadi anti-LGBT, antikomunisme, antisekulerisme, antiliberalisme, dan antipluralisme. Islam eksklusif berusaha membuat homogenitas di kalangan Islam Indonesia dengan slogan antiperbedaan. Propaganda ini direncanakan oleh pelaku lokal dan aktor nasional sebagai proses radikalisme dengan menganiaya Syiah dan aktivis konservatif yang menyebarkan ideologi

anti-Syiah di tingkat nasional (Al-Makin, 2017:9).

Bentuk sentimen anti-Syiah yang lain terjadi pada Pondok Pesantren Al-Islam Gumuk di Surakarta. Tidak jelas apa yang membuat Al-Islam Gumuk dianggap beraliran Syiah oleh sebagian masyarakat karena tidak ada pengakuan dari Al-Islam Gumuk bahwa mereka berpaham Syiah. Setidaknya terdapat 2 hal yang menyebabkan al-Islam Gumuk dicurigai beraliran Syiah. *Pertama*, Ustadz Mudzakir pernah belajar di Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) Bangil, Jawa Timur, yang merupakan salah satu cabang Syiah di Indonesia. *Kedua*, beliau pernah pergi ke Iran untuk belajar Islam (Muawanah, 2013:13). Dualitas Sunni-Syiah dalam percaturan Islam menimbulkan efek curiga, permusuhan dan perpecahan. Sementara itu, menurut Buya Syafii Maarif perpecahan antar keduanya adalah buah dari perebutan kuasa politik (Ma'arif, 2018:12). Melupakan kotak-kotak Islam yang ada dan menuju jalur persatuan dengan memandang Islam (tanpa embel-embel Sunni, Syiah, Khawarij, Muktazilah, Murjiah dan Qadariyah) sebagai solusi reformasi akhlak beragama dan bernegara adalah aksi kongkrit untuk mengatasi perpecahan di internal umat Islam sendiri.

Wacana anti-Syiah yang semakin diinternalisasi terkait dengan masalah dalam negeri yaitu ketakutan yang berlebihan dalam masyarakat Sunni Indonesia terbagi dalam tiga garis sejajar dan saling berhubungan: *pertama*, Syiah yang digambarkan sebagai penjahat mengacaukan tatanan sosial negara; *kedua*, tokoh agama yang dikenal simpati kepada ajaran Syiah dituduh merusak Islam Sunni, *ketiga*, ulama dari berbagai afiliasi keislaman yang melakukan pendekatan dogmatis, mendedikasikan waktu dan usaha untuk mengelusidasi perbedaan doktrinal dari Islam Syiah dicitrakan sebagai bagian dari Syiah kultural. Tiga artikulasi Syiah ini menunjukkan bagaimana politik, sosial, dan masalah teologis sering dicampuradukkan dengan tujuan

menyampaikan citra negatif dari Islam Syiah.

C. Kesimpulan

Gerakan anti-Syiah merupakan gerakan sosial yang digunakan sebagai wadah mobilisasi massa untuk menghalau pengaruh Syiah di Indonesia, khususnya pasca revolusi Iran. Pandangan tentang kebangkitan Iran adalah bentuk ancaman bagi mayoritas penduduk Indonesia. Pemerintah era Soeharto mulai membentengi pengaruh Syiah Iran melalui bekerjasama dengan Saudi Arabia dan Lembaga DDII. Kontestasi global mulai kentara antara Saudi Arabia dan Iran dalam berebut pengaruh sebagai negara superior dalam konteks Timur Tengah. Ormas NU dan Muhammadiyah sebagai ormas besar di Indonesia juga menjadi bagian dari stigmatisasi dari ancaman Syiah bagi NKRI. Melalui aksi kolektif, MUI memulai inisiasi dengan mengeluarkan fatwa sesat bagi paham Syiah, namun fatwa ini seolah menjadi sebuah stigmatisasi untuk masyarakat dalam memerangi dan bertindak keras terhadap pengikut ajaran Syiah. Bentuk propaganda terhadap Syiah mulai difasilitasi oleh Aliansi Anti-Syiah Nasional (ANNAS) melalui media online, kajian tematik dan aksi massa di ruang publik (*long march*). Stigma sesat, kafir, perusak Islam dan perusak NKRI disematkan kepada Syiah. Setidaknya, pemerintah sekarang harus lebih menegakkan sila kedua Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, dan para ulama juga harus lebih mengedepankan nilai Islam *rahmatan lil alamin* sebagai wajah Islam di ranah lokal atau global sebagai ciri Islam Indonesia.

Daftar pustaka

- Al Makin. 2017. Homogenizing Indonesian Islam: Persecution of the Shia Group in Yogyakarta. *Studia Islamika*, 24 (1).
- ANNAS. 2014, 20 April. *Teks Deklarasi Aliansi Nasional Anti Syiah*.

- <https://www.annasindonesia.com/profil/deklarasi-aliansi-nasional-anti-syiah> diakses 25 Oktober 2019.
- Formichi, Chiara. 2014. "From Fluid Identities to Sectarian Labels: A Historical Investigation of Indonesia's Shi'i Communities" *Al-Jamiah*, 52 (1), 101-126.
- Syarif, Dede, dkk. 2017. Anti Shi'ism in Indonesia: Geneology, Development, and Methods. *Harmoni*, 16 (1), 24-37.
- Dekmejian, R. Hrair. 2001. "Kebangkitan Islam: Katalisator, Kategori dan Konsekuensi," dalam *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*, ed. Shireen T. Hunter. Yogyakarta: Tiara Wacana,
- Heryanto, G. G. 2015. *Komunikasi Politik: Sebuah Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- IPAC, 2016. *The Anti-Shi'a Movement in Indonesia*. Laporan IPAC, No 27
- Sidel, John T. 2006. *Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press,
- Jurnal Islam. 2018. Dibubarkan Warga, Ini Kronologi Batalnya Perayaan Asyuro Syiah di Solo. <https://jurnalislam.com/dibubarkan-warga-ini-kronologi-batalnya-perayaan-asyuro-syiah-di-solo/> diakses 25 Oktober 2019 11.00 WIB.
- Klinken, Gerry van. 2007. *Communal Violence and Democratization in Indonesia*. London: Routledge.
- Ma'arif, Syaifi. 2018. *Krisis Arab dan Masa Depan Islam*. Ma'arif Instiute: Yogyakarta
- Muawanah, Siti. 2013. *Budaya Damai di Pesantren: Studi Terhadap Al-Islam Gumuk*. *Harmoni*, 12(2), 138-151. Retrieved from <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/181>
- Hisyam, Muhamad. 1986. *Syiah dalam Revolusi Iran*. Jakarta: LIPI.
- MUI Jatim. 2012. *Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prop. Jawa Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/1/2012* <http://ashadisasonko.staff.ipb.ac.id/files/2012/04/FATWA-MUI-JATIM-SYIAH-SESAT.pdf>
- Hasan, Noorhaidi. 2005. *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Quest untuk Identitas Pasca-Orde Baru Indonesia*. Universitas Leiden.
- Widda, Ahmed. 2013. *Dialog Ustadz Ba'asyir dan Ustadz Mudzakir Soal Syi'ah & Jihad Suriah*. Voaislam. <https://www.voaislam.com/read/indonesiana/2013/09/02/26610/dialog-ustadz-baasyir-dan-mudzakir-soal-syiah-jihad-suriah/>
- Zulkifli, 2013. *The Struggel of The Shi'i in Indonesia*. Canberra: ANU Press.